**Bupati HSU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Amuntai dengan PP KSO**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/10/14/bupati-hsu-tandatangani-kontrak-pekerjaan-pembangunan-rs-amuntai-dengan-pp-kso/*

Fraksi di DPRD Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan masih menyoroti kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai berdasarkan tahun jamak. Sejumlah fraksi masih mempertanyaan alokasi anggaran, kesesuian dengan dokumdokumen perencanaan pembangunan dan kesiapan pembangunan di masa Pandemi COVID-19 saat ini. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK di Amuntai, Selasa mengatakan, pembangunan RSUD Pambalah Batung harus dilakukan bertahap selama dua tahun anggaran.

"Karena anggaran di 2021 tidak mencukupi, maka pembangunan rumah sakit dilakukan bertahap dan simultan yang dilanjutkan pada tahun berikutnya di 2022," ujar Wahid.

Wahid mengatakan, pembangunan rumah sakit untuk anggarannya juga mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMi) persero sehingga membantu efektivitas pemanfaatan anggaran untuk pembangunan konstruksi yang produktif, sehingga pada saat pembangunan dilaksanakan tidak mempengaruhi struktur APBD yang ada.

Pada kamis 14 oktober 2021 Bupati bersama jajaran Dinas Kesehatan setempat melakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai di Desa Muara Tapus.

Penanda tanganan kontrak tersebut antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan PP KSO berlangsung Kamis (14/10) bertempat di Meeting Room Intan, Grand Dafam Q-Hotel Banjarbaru bersama Senior Vice President Head of Building Operation Division selaku kuasa PP KSO Andek Prabowo.

Selain Bupati dan Plt Kepala Dinas Kesehatan, turut hadir Forkopimda HSU dalam penandatanganan kontrak kerjasama, Ketua DPRD, Kepala Pengadilan Negeri, Kejari, perwakilan Polres HSU dan Kodim 1001, Sekretaris Daerah HSU, serta jajaran SKPD di HSU.

Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si merasa bersyukur hari ini, bisa dilaksanakan penandatanganan kontrak pembangunan RSUD Pambalah Batung Amuntai yang baru di Desa Muara Tapus. Dikatakan Bupati HSU bahwa RSUD Pambalah Batung Amuntai saat ini memang membutuhkan penambahan fasilitas. “Pasien yang datang rata-rata mencapai 300 orang per hari, itu masih pelayanan poli belum yang lain, bahkan untuk mengantri kami siapkan tenda di halaman RSUD Pambalah Batung Amuntai karena situasi pandemi saat ini,” terangnya.

Namun demikian, pihak RSUD Pambalah Batung Amuntai tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan bahkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit memberikan Akreditasi Paripurna berturut-turut selama 2 tahun kepada RSUD Pambalah Batung Amuntai. “Sebagai kepala daerah tentunya kami ingin memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, begitu pun masyarakat juga menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu dengan dibangunnya Rumah Sakit yang baru ini bisa mencukupi dan memberikan layanan kesehatan yang lebih memadai untuk masyarakat,” tambahnya.

Berkenaan dengan pembangunan rumah sakit baru ini, Bupati Wahid yakin pemasukan RSUD Pambalah Batung Amuntai ini cukup menjanjikan untuk membayar biaya pembangunan rumah sakit yang baru dan setelah dikalkulasi bahkan tidak APBD tidak terkena imbas dari pembangunan rumah sakit baru ini karena pemasukan dari rumah sakit sendiri sudah sangat mencukupi.

Bupati Wahid juga menambahkan, pihaknya dan seluruh forkopimda akan mendukung sepenuhnya dalam pembangunan rumah sakit baru ini agar berjalan sukses dan lancar. Dan lokasi pembangunan juga dapat dikatakan aman dan kondusif.

Sementara itu, Andek Prabowo menyampaikan, pertemuan ini sebagai langkah awal yang baik untuk memulai upaya bersama meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat Kabupaten HSU.

“Oleh karena itu penting untuk membangun kerjasama yang baik antara PP KSO dengan seluruh stakeholder terkait agar pembangunan ini dapat segera kita laksanakan dan berjalan dengan baik,” katanya.

Adapun pembangunan RSUD Pambalah Batung Amuntai Baru di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah akan dilaksanakan dalam jangka waktu 390 hari kalender dengan biaya Rp.174.366.056.639,83-. Adapun organisasi pengguna barang dan jasa adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. “Setelah penandatanganan kerjasama kami akan langsung menurunkan tim untuk berkoordinasi terkait dengan kegiatan ini sehingga kegiatan kedepannya bisa terlaksana dengan segera dan lancar,” sampainnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/14/bupati-hsu-tandatangani-kontrak-pekerjaan-pembangunan-rs-amuntai-dengan-pp-kso/>, *Bupati HSU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Amuntai dengan PP KSO* *,* 17 Oktober 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/261054/dprd-masih-soroti-pembangunan-rumah-sakit-daerah>, *DPRD masih soroti pembangunan rumah sakit daerah***,** 17 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

 Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

 Program Pembangunan Nasional

* Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
* Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
* RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
* RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
* RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
* Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
* Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
* Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

* Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
* Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

* Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
* Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
* Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
* Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
* Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
* Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
* Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
* Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
* Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing–masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkankan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembagalembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
* Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.